

# DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK ANTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA DENGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD SUMATERA UTARA PERIODE 2018-2023

Oleh:  
Leo Bastari Bukit <sup>1)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>1)</sup>  
E-mail:  
[leobastaribukit@gmail.com](mailto:leobastaribukit@gmail.com)

## ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze the dynamics of political communication, obstacles to political communication, and changes in attitudes between Governor Edy Rahmayadi and the PDI Perjuangan faction of the North Sumatra DPRD. Critical research paradigm, with the type of research used is descriptive with a qualitative approach. The research informant is the chairman of the North Sumatra DPRD PDI-P faction, who has credibility and knows the actual background of the dynamics of political communication between the Governor of North Sumatra Province and the North Sumatra DPRD PDI-P faction. Data collection techniques can be done in several ways, namely interviews, observation and documentation. Data analysis techniques: data collection stage, data reduction stage, data presentation stage and conclusion drawing stage. The results of research on the dynamics of criticism in political communication are an effort to evaluate Governor Edy Rahmayadi's performance to become better, where the criticism given is in the form of political communication. The criticism given by the PDI Perjuangan faction of the DPRD of North Sumatra to Governor Edy Rahmyadi for making North Sumatra under the leadership of Edy Rahmyadi in accordance with the development strategy for North Sumatra with dignity. In the process political communication can experience distortion, so one component of political communication is obstacles. Not much different from communication in general, obstacles in political communication can be technical, socio-cultural or semantic, related to political polarization, lack of resources, dependence on information, conflict of interest, legal powerlessness, public disagreement, power imbalance, intimidation or threats and force. external. Governor Edy Rahmayadi made performance changes to make North Sumatra even better.*

**Keywords:** *Dynamics of Political Communication, Changes in Attitudes, PDI-P Faction, Governor of North Sumatra*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika komunikasi politik, hambatan komunikasi politik, dan perubahan sikap antara Gubernur Edy Rahmayadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Paradigma penelitian kritis, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, yang memiliki kredibilitas dan mengetahui latar belakang sebenarnya dinamika komunikasi politik Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dinamika kritikan dalam komunikasi politik yang merupakan upaya evaluasi terhadap kinerja Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadi lebih baik, dimana kritikan yang diberikan bentuk dari komunikasi politik. Kritikan yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Edy Rahmyadi untuk menjadikan Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edy Rahmyadi sesuai dengan strategi pembangunan Sumatera Utara Bermartabat. Dalam prosesnya komunikasi politik dapat mengalami distorsi, maka salah satu komponen dari komunikasi politik adalah hambatan. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya, hambatan dalam komunikasi politik dapat bersifat teknis, sosial budaya maupun semantic, terkait polarisasi politik, kekurangan sumber daya, ketergantungan pada informasi, konflik kepentingan, ketidakberdayaan hukum, ketidaksepahaman publik, ketidakseimbangan kekuatan,

intimidasi atau ancaman dan kekuatan eksternal. Perubahan-perubahan kinerja yang dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadikan Sumatera Utara lebih baik lagi.

## **Kata Kunci: Dinamika Komunikasi Politik, Perubahan Sikap, Fraksi PDI Perjuangan, Gubernur Sumatera Utara**

### **1. PENDAHULUAN**

Komunikasi politik merupakan faktor penting untuk menjamin berjalannya fungsifungsi pemerintahan daerah demi kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup bersama. Partai politik saat ini berperan penting sebagai pintu masuk bagi para calon pimpinan politik. Mereka yang aktif dan menjadi pimpinan partai politik adalah para politisi yang telah berpengalaman dalam bidang kekuasaan. Komunikasi politik memiliki keterkaitan dengan bagaimana menjelaskan proses politik dari perspektif komunikasi. Memperkenalkan calon kandidat kepala daerah baru diperlukan strategi komunikasi dan persuasi politik untuk mendapatkan perolehan suara. Keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala daerah langsung sangatlah besar bahkan bisa dikatakan dominan.

Pemilihan kepala daerah secara serentak telah berlangsung di beberapa daerah pada tanggal 27 Juni 2018, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Pilkada ini diikuti dua pasangan calon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut tidak terlepas dengan adanya dukungan partai politik, pasangan Edy-Musa diusung Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura, dan pasangan Djarot-Sihar diusung PDI Perjuangan dan PPP, yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut. Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2018-2023 berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut (<https://www.cnnindonesia.com>).

Kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, menuai dinamika komunikasi politik dengan partai yang tidak sebagai pengusung pasangan Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023, yaitu Partai PDI Perjuangan, dilihat dengan adanya kritikan-kritikan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Periode

2018-2023, terlihat pada pemberitaan-pemberitaan media massa online, sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Soroti Kinerja Pemerintahan Gubernur Edy Rahmayadi
2. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Akan Evaluasi Kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah
3. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Tolak LPJP Gubernur Sumut TA 2019
4. Fraksi PDI Perjuangan Sumut: Edy Rahmayadi Netral?
5. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Kritik Gubsu Edy: Membual!
6. Kritikan dan Penolakan terkait APBD Tahun 2021 Fraksi PDI Perjuangan juga menolak terhadap rencana penambahan modal BUMD, serta mendorong upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, perikanan dan lainnya. "Kemudian dana CSR BUMD Sumut harus dipergunakan dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat," lontarnya (<https://sumut.idntimes.com>).
7. PDI Perjuangan: Kinerja Gubernur Edy Tidak Sesuai Harapan Rakyat

Secara historis pasca kemenangan Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023 dari beberapa kritikan dan penolakan yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan, terlihat jelas adanya dinamika komunikasi politik yang terjadi. Berjalanya waktu menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029, terlihat adanya perubahan sikap. Pada awal Pilkada tahun 2018-2023 tidak mendukung, dan menjelang Pilkada Tahun 2024-2029 Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan, berbagai dukungan-dukungan terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang dilansir media online sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan Lempar Kode Dukung 2 Periode, Gubsu Edy: Berarti Jadilah Aku Lagi
2. PDI Perjuangan Dukung Gubsu Perbaiki Jalan Pakai Anggaran Rp 2,7 Triliun

Terlihat jelas dinamika komunikasi politik yang terjadi terlihat dengan adanya penolakan dan perubahan menjadi dukungan. Komunikasi politik lazim dikaitkan dengan

pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun nonverbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Sederhananya dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama (Siti Rohmah, 2018: 3).

Dinamika komunikasi politik, umum dilakukan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat menyatakan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya. Lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, baik yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, pengawasan, maupun anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif tentu sangat diperlukan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak jarang keduanya saling bersitegang atau salah satu dari mereka lebih mendominasi komunikasi dalam tataran politik

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Dinamika komunikasi politik di Provinsi Sumatera Utara, pasca kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeksyah saat ini seolah didominasi oleh kritikan-kritikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatra Utara dalam setiap perbincangan, pemberitaan, maupun di media sosial. Komunikasi Politik seolah direduksi ke dalam bentuk komunikasi langsung yang tertuju terhadap kritikan Gubernur Edy Rahmayadi-Musa Rajeksyah Sumatera Utara, namun berjalannya waktu adanya perubahan sikap yang terlihat jelas juga dari pemberitaan media sosial Fraksi PDI Perjuangan mulai mendukung kebijakan oleh Gubernur Edy Rahmayadi dan memberikan dukungan untuk maju ke Pilgubsu Periode 2024-2029.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman dan persepsi komunikan. Oleh karena itu komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya

mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol.

Menurut Agus M. Hardjana (2016 :15) “Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyatakan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan”. Deddy Mulyana (2015: 11) “Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Andrew E. Sikula (2017: 145) “Komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain”.

Komunikasi politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia adalah dua wilayah pencarian yang masing-masing relatif berdiri sendiri. Keduanya memiliki kesamaan karena objek materialnya sama, yaitu manusia. Kesamaan ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini karena masing-masing mempunyai sifat interdisipliner yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beriringan dengan disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi dan psikologi; hal yang sama juga berlaku bagi ilmu politik (Aswan Jaya, 2021: 9).

Komunikator politik merupakan unsur terpenting dalam komunikasi politik, karena proses pesan untuk sampai kepada khalayak tentu melalui komunikator politik. Pada dasarnya yang melakukan komunikator politik yang relatif banyak adalah mereka yang memiliki nama besar atau seorang pemimpin. Dalam hal ini, tentu tidak luput dari yang namanya kepemimpinan politik. Dimana kepemimpinan politik dituntut untuk mempertahankan kinerja politiknya dengan baik, hingga mampu memunculkan dukungan-dukungan yang signifikan serta mampu mengelola politik dengan baik dan efektif. Disamping itu juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan berbagai topik. Tentu seorang

pemimpin politik harus paham benar tentang etika politik sehingga prosesnya berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan (Kustiawan, 2022: 13).

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang bersumber dari komunikator politik. Tujuan komunikasi politik adakalanya sekedar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public opinion dan meng-handle pendapat atau tuduhan menarik simpatik khayalak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik menjelang pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif dan sebagainya.

Menurut Anwar Arifin (2017:142), menyebutkan empat tujuan dari komunikasi politik, sebagai berikut:

1. Citra politik.
2. Pendapat umum.
3. Partisipasi politik dalam pemilihan umum.
4. Pemilu dan Kebijakan Politik.

Aspek komunikasi politik memiliki peran tersendiri, walaupun tetap memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapannya. Komponen dalam komunikasi politik tersebut antara lain komunikator politik, pesan politik, media yang digunakan, khalayak, dan akibat yang ditimbulkan (Putri, 2015: 52). Beberapa unsur yang harus ada dalam proses komunikasi politik.

a. Komunikator Politik.

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif.

b. Pesan politik.

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, verbal maupun nonverbal yang isinya mengandung bobot politik.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyatakan pesan-pesan politiknya.

d. Sasaran dan Target Politik.

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi.

Politik Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian suara sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi politik.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih informan untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, yang memiliki kredibilitas dan mengetahui latar belakang sebenarnya dinamika komunikasi politik Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, dan informan lain yang dipandang perlu sampai dengan jenuhnya informasi yang disampaikan oleh informan yang berarti tidak ada lagi variasi informasi yang disampaikan.

Adapun informan penelitian ini adalah:

- a. Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023, Bapak Edy Rahmayadi
- b. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024, Bapak Mangapul Purba S.E
- c. Ketua DPRD Sumatera Utara Periode 2019-2024, Bapak Drs. Baskami Ginting
- d. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Periode 2019-2024 Bapak Drs. Rapidin Simbolon, MM.

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1. Tahap Pengumpulan data
2. Tahap Reduksi Data.
3. Tahap Penyajian Data (Data Display).
4. Tahap Penarikan Kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dinamika Komunikasi Politik Antara Gubernur Sumatera Utara dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara**

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Terdapat dua fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dikaji, yaitu : Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, di mana pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut akan diumpun balik ke pihak publik di ranah infrastruktur politik yang terhimpun dalam kesatuan kekuatan massa seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau nongovernmental organizations (NGOs), partai politik, organisasi massa (ormas), media massa, dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan.

Dinamika komunikasi politik mengacu pada interaksi, pertukaran informasi, pesan, dan komunikasi antara berbagai aktor politik, seperti pemimpin politik, partai politik, lembaga pemerintahan, media massa, dan masyarakat umum. Ini

melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal, baik secara langsung maupun melalui media, yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku publik terhadap isu-isu politik. Bahwa komunikasi politik adalah sebuah proses pengoperan lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber, selaku pihak yang memprakarsai komunikasi, kepada khalayak dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Komunikasi politik adalah fase tertinggi komunikasi dan menyeluruh (komprehensif), karena proses komunikasi politik melalui fase-fase mulai dari komunikasi intrapersonal, antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi antarbudaya, komunikasi internasional. Dengan kata lain komunikasi politik merupakan komunikasi yang kompleks dan multi komunikasi.

Memasuki kebebasan berkomunikasi pasca reformasi politik di Indonesia, pembicaraan politik di forum terbuka yang mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi hal yang biasa. Padahal, sebelumnya tidak mudah mengungkapkan kritik terhadap pelayanan publik di Indonesia. Terlebih lagi jika kritik itu menyangkut pusat-pusat kekuasaan. Bahkan sebatas bernostalgia terhadap masa pemerintahan sebelumnya pun sulit diungkapkan di ruang-ruang publik, akibat kontrol ketat terhadap arus informasi lateral maupun vertikal dari pemerintah sebelum reformasi politik.

Terjadinya perubahan sistem politik di Indonesia sejak tahun 1998, jelas membawa dampak kompleks dalam

kebebasan mencari, menggunakan dan menyatakan pendapat kepada khalayak. Karena, satu sisi menerima kebebasan berkomunikasi, sementara di pihak lainnya, justru merasa terganggu dan memposisikan demokrasi berkomunikasi sebagai biang keladi dari berbagai masalah. Tentu saja dapat dimaklumi, mengingat pola komunikasi dalam pemberitaan, penyiaran dan pembicaraan publik, yang diunggulkan adalah demi stabilitas nasional. Sebuah jargon komunikasi politik populer pada masanya, yang menghasilkan komunikasi linier datar dalam bingkai keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Dalam nuansa tanpa gejolak dan keseragaman informasi satu arah tanpa interaksi egaliter, maka ruang-ruang publik diisi oleh komunikasi politik sebagai epigon retorika kekuasaan negara, yang cenderung mengedepankan keberhasilan dibandingkan ketidakmampuan mengemban sejumlah tugas pembangunan untuk seluruh rakyat, tanpa diferensiasi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 F, menyebutkan: bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyatakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berpijak kepada ketentuan ini, maka kebebasan berkomunikasi merupakan hak masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, hak berkomunikasi seringkali dikaitkan dengan komunikasi politik atau penyampaian pesan-pesan kepada khalayak atau rakyat yang di dalamnya mengandung kebijakan kekuasaan negara.

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun nonverbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik

dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Pilgub secara langsung sebagai bentuk amanat normatif atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan partisipatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005.

Pemenangan Gubernur Sumatera Utara Pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah tidak terlepas dengan partai pengusung dengan tujuh partai pendukung antara lain yaitu Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan Golkar, sedangkan Pasangan Djarot Sihar dengan dua partai pengusung yaitu PDI Perjuangan dan PPP, tentu saja secara teoritis mesin partai itu, dengan semakin banyak partai yang mengusung secara struktur partai yang bekerja juga semakin banyak.

Memasuki kinerja satu tahunnya Gubernur Sumatera Utara, Pemenangan Gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberi sejumlah catatan, evaluasi dan masukan atas setahun kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan, terdapat empat kesimpulan pihaknya sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Eramas dalam setahun kepemimpinan mereka di Sumut, sejak dilantik pada 5 September 2018 (<https://sumutpos.jawapos.com>).

Eramas belum memahami seutuhnya tentang permasalahan riil. Kedua, pihaknya

belum melihat pembagian tugas yang nyata antara Gubernur dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta sinergitas antara organisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan dan mengakibatkan kebijakan lintas sektor menjadi lemah. Ketiga, belum ada gebrakan nyata selama setahun untuk memenuhi janji mewujudkan Sumut bermartabat.

Kritikan dari DPRD terhadap kinerja seorang Gubernur adalah bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat daerah pada era otonomi saat ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya dan bermitra dengan lembaga pemerintahan daerah lainnya.

Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, masyarakat selalu menumpahkan mimpi-mimpinya langsung atau tidak langsung kepada wakilnya, karena masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD dapat menjalankan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan tersebut akan merubah peta pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia termasuk perubahan terhadap pengawasan daerah yang akan berimplikasi pada perubahan pengawasan terhadap anggaran daerah. Pemberian otonomi luas kepada Daerah membawa konsekuensi diperlukannya penyesuaian tata kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan di

daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai badan perwakilan rakyat daerah, sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah,

DPRD dan pemerintah daerah dapat dikatakan merupakan dua sisi mata uang, sehingga harus memahami bahwa arti hubungan kemitraan dalam membuat kebijakan daerah, dan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing dengan tetap saling mengisi, saling melengkapi, dan bersinergi sebagai komponen pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 316 bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD.

Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi, pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan

Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Provinsi dan Kabupaten/Kota). Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*.

Namun Kritik yang disampaikan

Dinamika komunikasi Politik DPRD sebagai lembaga politik yang memiliki tugas legislasi, perencanaan anggaran (*budgeting*), dan pengawasan sangat relevan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki peran krusial dalam mengawal dan mewujudkan aspirasi rakyat serta mengelola sumber daya negara secara efisien dan akuntabel. Dinamika komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas ini memang sangat wajar, mengingat keberagaman pandangan dan kepentingan yang harus diakomodasi. Dinamika komunikasi politik mengacu pada interaksi, pertukaran pesan, dan proses komunikasi yang terjadi dalam konteks politik. Bentuk dinamika komunikasi politik bisa sangat beragam dan kompleks, tergantung pada lingkungan politik, teknologi yang digunakan, budaya komunikasi, dan banyak faktor lainnya.

Bentuk dinamika komunikasi politik

Komunikasi politik memungkinkan aktor-aktor politik seperti pemerintah, partai politik, dan kandidat untuk mempengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat. Mereka menggunakan pesan, argumen, dan kampanye untuk meyakinkan publik agar mendukung kebijakan, kandidat, atau isu tertentu. Dinamika komunikasi politik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Media massa dan platform online memainkan peran penting dalam menyebarkan berita, analisis, dan informasi mengenai kebijakan, isu-isu politik, dan perkembangan terbaru. Aktor politik berusaha untuk membentuk opini publik melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik. Masyarakat menerima informasi dan argumen dari berbagai sumber, dan dinamika komunikasi politik memainkan peran dalam

membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap isu-isu tertentu.

Dinamika adanya kritikan bentuk dari komunikasi politik yang merupakan upaya evaluasi terhadap kinerja Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadi lebih baik, dimana kritikan yang diberikan bentuk dari komunikasi politik. Dijelaskan bahwa komunikasi politik merupakan penggabungan antara konsep komunikasi dan politik. Namun, dalam praktek penerapannya, konsep komunikasi politik itu sendiri akan dipengaruhi oleh perspektif atau objek analisis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan sebuah peristiwa politik. Komunikasi politik didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah (Wahid, 2018).

Secara lebih terperinci, Gabriel Almond, sebagaimana dikutip oleh Umaimah Wahid, menyatakan bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, berkaitan dengan ketertarikan isu-isu politik, pembuatan peraturan politik, aturan aplikasi peraturan politik, dan aturan-aturan lainnya yang melibatkan proses serta tindakan komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik menitikberatkan pada proses penyampaian pesan politik di antara berbagai bagian yang ada di dalam sistem politik. Tentunya pemahaman definisi dari pesan politik dan aktor politik menjadi unsur penting dalam memahami konsep komunikasi politik.

### **Hambatan Komunikasi Politik Antara Gubernur Sumatera Utara Dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara**

Dalam konteks komunikasi politik, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi efektivitas komunikasi antara aktor-aktor politik dan masyarakat. Hambatan-hambatan ini dapat merugikan pemahaman yang akurat, partisipasi yang efektif, dan tujuan komunikasi politik secara keseluruhan. Kritik yang diberikan DPRD Fraksi PDI Perjuangan, hal yang wajar



menjadi tugas DPRD untuk memastikan jalannya kinerja pemerintah. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak

Kritikan sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat Sumatera Utara, dengan upaya untuk mencari akar permasalahan dari kendala yang dihadapi. Namun disuatu sisi kritikan digambarkan sebagai ketidakpuasan atau ketidak dukungan terhadap kinerja Gubernur Edy Rahmyadi. Namun Kritikan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Gubernur Sumatera Utara bisa menciptakan dinamika komunikasi politik yang kuat dan kompleks. Hal ini seperti yang dilansir DetikSumut selasa 26/07/2022 “Edy Rahmayadi mengaku tidak mengetahui tugasnya sebagai Gubernur Sumut meski sudah 4 tahun menjabat. Hal ini mendapatkan kritikan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara”.

DPRD Sumatera Utara yang bertugas memberikan pengawasan terhadap Gubsu juga dilakukan oleh DPRD Sumut. Bahkan, DPRD Sumut disebut sampai membuat pansus untuk membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur Edy Rahmayadi. Selain itu, secara konstitusional DPRD Sumut terus menerus mengawasi dan memberikan assesment yang disampaikan melalui sidang-sidang paripurna dan lainnya hasil dari reses, kunjungan dapil, kunjungan kerja dan lain sebagainya, bahkan harus sampai membentuk Pansus untuk membuktikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai atau tidak, benar atau tidak. Seluruh kegiatan DPRD Sumut memberikan catatan dan rekomendasi tentang baik buruknya kinerja Edy Rahmayadi. Pernyataan Edy Rahmayadi yang menyebut tidak adanya pengawasan terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Sumut merupakan bentuk mengabaikan peran dari DPRD Sumut.

Fraksi PDI Perjuangan terus memberikan kritik yang membangun dan bahkan pernah memberikan raport merah terhadap kinerja Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. Akhirnya, kritikan tersebut direspon positif oleh Edy Rahmayadi dengan

berbagai program Pembangunan infrastruktur. Sangat jelas bahwa kritikan yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjadikan Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi sesuai dengan strategi pembangunan Sumut yaitu Sumatera Utara Bermartabat. Dalam prosesnya komunikasi politik dapat mengalami distorsi, maka salah satu komponen dari komunikasi politik adalah hambatan. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya, hambatan dalam komunikasi politik dapat bersifat teknis, sosial budaya maupun semantik.

Keberadaan partai politik yang mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi, apabila dilakukan dengan maksimal. Salah satunya fungsi komunikasi politik. Partai politik bersama fungsi yang dimilikinya diharapkan mampu menambah efektivitas proses komunikasi politik. Pengawasan DPRD terhadap kinerja Gubernur dengan komunikasi politik merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Namun, ada beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut:

- a. Polarisasi Politik: Jika DPRD dan Gubernur berasal dari partai yang berseberangan atau jika ada polarisasi politik yang tinggi, pengawasan dapat menjadi sulit karena cenderung dipolitisasi dan mungkin tidak berfokus pada substansi.
- b. Kekurangan Sumber Daya: DPRD mungkin memiliki keterbatasan sumber daya seperti tenaga, anggaran, atau akses ke informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang mendalam.
- c. Ketergantungan pada Informasi: DPRD seringkali bergantung pada informasi yang diberikan oleh pemerintah atau eksekutif dalam melakukan pengawasan. Jika informasi ini tidak akurat atau ditutup-tutupi, pengawasan dapat terganggu.
- d. Konflik Kepentingan: Anggota DPRD mungkin memiliki konflik kepentingan

- atau hubungan politik dengan pihak eksekutif yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas pengawasan.
- e. Ketidakberdayaan Hukum: Jika DPRD tidak memiliki kewenangan atau instrumen hukum yang cukup kuat untuk melakukan pengawasan efektif, mereka mungkin sulit untuk memaksa pihak eksekutif untuk bekerja sama.
  - f. Ketidakefektifan Publik: Masyarakat mungkin kurang memahami pentingnya pengawasan oleh DPRD atau kurang memiliki pengetahuan tentang isu-isu yang sedang diawasi, mengurangi tekanan publik terhadap pihak eksekutif.
  - g. Ketidakseimbangan Kekuatan: Jika kekuatan antara DPRD dan Gubernur tidak seimbang, DPRD mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan yang efektif.
  - h. Intimidasi atau Ancaman: Anggota DPRD atau individu yang berusaha melakukan pengawasan mungkin menghadapi intimidasi atau ancaman dari pihak eksekutif atau kekuatan lain yang ingin mencegah pengawasan.
  - i. Kekuatan Eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti media yang terbatas atau tekanan dari kepentingan khusus dapat mempengaruhi cara DPRD melakukan pengawasan.
  - j. Kelemahan Sistem Pengaduan: Jika sistem pengaduan atau mekanisme pelaporan tidak efektif, anggota DPRD mungkin kesulitan mendapatkan informasi tentang masalah-masalah di lapangan.

### **Perubahan Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara**

Kritikan-kritikan yang membangun dan bahkan pernah memberikan rapor merah terhadap kinerja Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut yang terus disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, dan akhirnya kritikan-kritikan tersebut direspon positif oleh Gubernur Edy Rahmayadi dengan berbagai program pembangunan terutama infrastruktur dengan sungguh-sungguh.

Perubahan sikap dari kritikan menjadi dukungan melalui komunikasi politik melibatkan strategi yang efektif untuk mempengaruhi pandangan dan sikap individu atau kelompok terhadap suatu isu atau entitas politik. Perubahan sikap dukungan terkait pembangunan yang dilaksanakan Gubernur Edy Rahmyadi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, dengan melempar kode siap mendukung Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadi Gubernur 2 periode dengan syarat. Kode itu dinilai menjadi cara PDI Perjuangan mengecek ombak menuju Pilgub Sumut 2024.

Dukungan Fraksi PDI Perjuangan tetap objektif dalam menilai kinerja Gubernur Edy Rahmayadi untuk meningkatkan pembangunan serta terealisasinya visi misi Sumut Bermartabat.

Terlihat bahwa dinamika komunikasi politik antara Gubernur Edy Rahmyadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, dengan memberikan kritikan selalu bersifat objektif, dimana kalau hasil kinerja harus dievaluasi untuk Sumatera Utara lebih baik selaku pengawasan kinerja harus mengkritisi, namun kinerja yang bagus akan memberikan dukungan terhadap pembangunan Sumatera Utara agar lebih baik lagi. Bentuk dukungan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara juga terlihat dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di Sumut berbiaya Rp. 2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears harus diselesaikan sesuai target 2023.

Kebijakan pembangunan infrastruktur senilai Rp. 2.7 triliun itu dinilai sangat bagus untuk kemajuan infrastruktur, yang akan dinikmati beberapa ruas jalan yang telah selesai dilakukan pengaspalan antara lain Jalan Mayjen TNI DI Panjaitan, Nagahuta Timur, Pematangsiantar, Jalan Sukaramai-Salak (ruas 63), Simpang Pertempuran-Batas Medan (Marelان), Jalan Ngumbang Surbakti-Simpang Gatot Subroto, Simpang Beringin-Hamparan Perak, ruas Perdagangan dan ruas lainnya.

Dukungan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan itu sebesar Rp 2,7 triliun. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mengatakan dukungan itu diberikan dalam rangka memajukan Sumut. Mangapul mengatakan kondisi jalan di Sumut sudah rusak, untuk itu dibutuhkan perbaikan.

Program perbaikan jalan ini merupakan hal yang mendesak. Langkah yang diambil Fraksi PDI Perjuangan ini untuk mendukung program ini, adalah untuk kepentingan rakyat banyak. anggaran Rp 2,7 Triliun untuk perbaikan jalan ini menggunakan anggaran tahun jamak. Pelaksanaan anggaran ini juga sudah sesuai dengan kontrak. DPRD memiliki peran penting dalam proses pembangunan di tingkat daerah. Sebagai lembaga legislatif lokal, DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, dan merumuskan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan daerahnya. Dukungan DPRD dapat berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Perubahan sikap dalam dinamika komunikasi politik adalah suatu fenomena yang umum terjadi dalam konteks politik. Sikap politik mengacu pada pandangan, keyakinan, dan penilaian seseorang atau kelompok terhadap isu-isu politik atau figur politik tertentu. Sikap ini dapat berubah seiring dengan perubahan situasi, informasi baru, atau pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan kinerja yang dilakukan Gubernur Edy Rahmyadi untuk menjadikan Sumatera Utara lebih baik lagi dengan konkrit dan nyata pembangunan yang dilaksanakan akhir-akhir ini termasuk dengan kebijakan pembangunan senilai Rp. 2.7 Triliun untuk perbaikan jalan direspon baik dan dikung oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Kinerja yang dilakukan Bapak Gubernur Edy Rahmyadi semakin membaik untuk Sumatera Utara.

Menjelang akhir kepemimpinan Bapak Gubernur Edy Rahmyadi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menyatakan sikap mendukung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk menjadi Gubernur 2 Periode dengan syarat. Di lansir Detiknews.com, Rabu 22 September 2021, disampaikan Fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna akhir di DPRD Sumut tentang APBD Sumut 2021. Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp. 2.7 Triliun ini dengan tanpa melanggar koridor hukum akan memberikan penilaian positif kepada Gubernur Edy Rahmyadi dan masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumatera Utara kedepannya.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberikan dukungan kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan. Sesungguhnya masyarakat Sumatera Utara tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah Rp2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pihak, masyarakat Sumatera Utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin oleh Gubernur bapak Edy Rahmayadi menjadi baik dan bermartabat.

Sikap politik media bisa terjadi dalam dua konteks. Pertama, media memiliki posisi politik yang independen terhadap realitas politik yang ada. Kedua, media mengikuti realitas politik yang menonjolkan kekuatan-kekuatan politik tertentu dalam sistem politik. Agenda media sangat ditentukan oleh aktor lain dari luar. Karena itu sikap media tidak otonom. Sikap politik pers termanifestasi dalam konstruksi berita.

Perubahan sikap mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan sikap. Artinya perubahan sikap juga merupakan pembentukan sikap. Namun karena sudah ada sikap sebelumnya, maka proses transisi kepada sikap yang baru, lebih baik menggunakan istilah perubahan sikap. Jadi, sebagaimana pada pembentukan sikap, pembelajaran (learning), pengalaman pribadi, sumber-sumber informasi yang lain, serta kepribadian, merupakan faktor-faktor yang dapat mengubah sikap. Umumnya Attribution Theory Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seseorang merespons suatu kejadian dengan menggunakan tolok ukur perilaku yang mereka miliki secara relatif dibandingkan dengan perilaku orang lain.

Komunikasi politik sendiri merupakan komunikasi yang erat kaitannya dengan pesan bermuatan politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik kepada khalayak politik, melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat (Suryana, 2019: 17). Dengan demikian, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikais tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa dengan melakukan komunikasi maka segala gagasan, ide, informasi maupun pesan-pesan politik dapat disampaikan, diterima dan mendapat efek dari individu maupun kelompok lain yang merupakan komunikan politik yang ditargetkan. Dalam komunikasi politik, juga terdapat sebuah dinamika, yaitu semacam hubungan sebab akibat dari interaksi dalam komunikasi politik yang dilakukan, perkembangannya dan penyelesaian dari hubungan sebab akibat tersebut. Atau dengan kata lain, dapat diartikan bahwa dinamika merupakan pergerakan arus pesan politik yang terjadi.

Hal ini dengan adanya kritikan atau sangahan untuk lebih baik lagi, komunikasi politik memiliki kekuatan dalam menyikapi

hal tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samaro (2019), dalam hal Politik Perubahan Sikap (*Attitude Change Theory*) merupakan gagasan yang berkaitan dengan proses ketidaksesuaian dan keslektifan. Perubahan sikap ini dapat terjadi karena adanya stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Dalam komunikasi sikap atau attitude merupakan hal yang melekat, sebab dalam komunikasi sendiri sikap memegang peranan yang penting sebagai elemen yang mengefektifkan komunikasi sebagaimana elemen elemen komunikasi tentang bagaimana sikap.

## 5. SIMPULAN

1. Dinamika komunikasi politik yang ada antara komunikasi politik antara Gubernur Sumatera Utara dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, yaitu kritikan dalam bentuk evaluasi komunikasi politik yang merupakan upaya untuk menganalisis, menilai, dan memberikan pandangan kritis terhadap bagaimana kinerja pemerintahan Gubernur Edy Rahmyadi, hal ini sangat umum dilakukan sebagai fungsi legislatif yaitu memberikan pengawasan. Dinamika kritikan dalam komunikasi politik yang merupakan upaya evaluasi terhadap kinerja Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadi lebih baik, dimana kritikan yang diberikan bentuk dari komunikasi politik.
2. Kritikan yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Edy Rahmyadi untuk menjadikan Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edy Rahmyadi sesuai dengan strategi pembangunan Sumatera Utara Bermartabat. Dalam prosesnya komunikasi politik dapat mengalami distorsi, maka salah satu komponen dari komunikasi politik adalah hambatan. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya, hambatan dalam komunikasi politik dapat bersifat teknis, sosial budaya maupun semantic, terkait polarisasi politik, kekurangan sumber daya, ketergantungan pada informasi, konflik kepentingan,

- ketidakberdayaan hukum,  
ketidaksepehaman publik,  
ketidakseimbangan kekuatan, intimidasi  
atau ancaman dan kekuatan eksternal.
3. Perubahan-perubahan kinerja yang dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk menjadikan Sumatera Utara lebih baik lagi. Fakta konkritnya pembangunan yang dilaksanakan akhir-akhir ini termasuk dengan kebijakan pembangunan senilai Rp. 2.7 Triliun untuk perbaikan jalan direspon baik dan didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp. 2.7 Triliun ini dengan tanpa melanggar koridor hukum akan memberikan penilaian positif dan akhirnya Fraksi DPRD PDI Perjuangan memberikan dukungan dua periodenya Gubernur Edy Rahmayadi memimpin Sumatera Utara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agus M. Hardjana, (2016). Ilmu Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Djuyandi, Y. (2017). Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua Dpd Ii Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016–2021. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 10–21.
- Badara, Aris. 2016. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyana, Deddy. 2015. Ilmu Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Edy, Sutrisno, (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendy, (2015). Ilmu Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, Irham. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta Hasibuan, Malayu. S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta
- Gonçalves, G. (2018). Political communication.
- Harlod D. Lasswell, (2016). Komunikasi Organisasi. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Hasan, E. A., Idris, A., & Dama, M. (2018). Analisis Bentuk Komunikasi Politik Pemerintah Daerah Dan Dprd Dalam Penyusunan Apbd Di Kota Samarinda.
- Irpan, M., Sanusi, S., & Susanto, D. (2022). Komunikasi Politik Bil Hikmah Datuk Kalampayan Dan Relevansinya Dewasa Ini. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 72-83.
- Jaya Aswan. (2022). Komunikasi Politik Peradaban. Yogyakarta: Lingkaran
- Khanoris, W. (2015). Dinamika Komunikasi Politik Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Studi Kasus Mengenai Komunikasi Politik Calon Ketua Termuda Dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Periode 2015-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenada Media Group.
- Kustiawan, W., Liusnimun, T., Hidayat, N., & Wahidin, J. (2022). Komunikator Utama dalam Politik, Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. J-

- KIs: Jurnal Komunikasi Islam, 3(1), 13-22.
- Lukas Dwiantara, 2015. Ilmu Komunikasi. Bandung : Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McNair, Brian. (2016). Pengantar Komunikasi Politik. Bandung: Nusa Media
- Mulyana, Deddy. 2012. Komunikasi Politik, Politik Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mulyana, Deddy. 2015. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah. 2017. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Proposal Tesis, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. Nugraha
- Norris, P. (2017). Political Communication.
- Putri, R. E. (2017). Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). Jurnal Jurisprudence, 5(1), 50-63.
- Ratnaningsih Dewi. 2019. Analisis Wacana Kritis: Sebuah Teori dan Implementasi. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi
- Rani, S. (2019). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Indonesia. Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 112-128.
- Riswandi. (2015). Ilmu Komunikasi. Graha Ilmu. Robbins, (cetakan ketiga).
- Safitri, P. N. (2019). Dinamika Media Komunikasi sebagai Interaksi Politik.
- KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 11(2), 1-21.
- Samaro, N. (2019). Dinamika Komunikasi Politik Pada Perubahan Sikap Oposisi Terkait Jabatan Pada Kabinet Kementrian.
- Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika
- Shahreza, M. (2017). Komunikator politik berdasarkan teori generasi. Nyimak: *Journal of Communication*, 1(1), 33-48.
- Slamet, Santoso. (2004). Dinamika Kelompok. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suliyanto (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Proposal Tesis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suparman, N., & Septiadi, M. A. (2021). Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol, 24(2), 161-174.
- Suprawoto. (2018). Government Public Relations. Jakarta: Kencana.
- Suryana Cecep. 2019. Komunikasi Politik. Teori dan Praktik. Mimbar Pustaka: Bandung
- Wibowo, A. (2019) Pola Komunikasi Masyarakat Adat. Khazanah Sosial. 1 (1), 15–31
- Yin, R. (2019). Studi Kasus, Desain dan Metode. Depok: Raja Grafindo Persada
- Yodiansyah, H. (2017). Komunikasi politik media surat kabar dalam studi pesan realitas politik pada media cetak riau pos dan tribun Pekanbaru. Jurnal Kajian Komunikasi, 5(1), 11-30.

Yusup Raidah I. 2022. Komunikasi Politik Seni dan Teori. Yogyakarta. Budi Utama

Zaenal Mukarom. 2016. Komunikasi Politik. Bandung: CV Pustaka Setia

**Sumber Lain:**

<https://www.palapapos.co.id/listing/view/1559/30/fraksi-pdip-dprd-sumut-soroti-kinerja-pemerintahan-Gubernur-edy-rahmayadi>

<http://asaberita.com/fraksi-pdip-dprd-sumut-tolak-lpjp-Gubernur-sumut-ta-2019/>

<https://www.gatra.com/news-412207-politik-fraksi-pdip-sumut-edy-rahmayadi-netral.html>

<https://sumut.suara.com/read/2021/06/24/150601/fraksi-pdip-dprd-sumut-kritik-gubsu-edy-membual>

<https://www.gatra.com/news-503600-politik-pdip-kinerja-Gubernur-edy-tidak-sesuai-harapan-rakyat.html>

<https://news.detik.com/berita/d-5742039/pdip-lempar-kode-dukung-2-periode-gubsu-edy-berarti-jadilah-aku-lagi>

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6113856/f-pdip-dukung-gubsu-perbaiki-jalan-pakai-anggaran-rp-27-t>

<https://www.metro-online.co/2019/07/fraksi-pdip-dprd-sumut-akan-evaluasi.html>

<https://ladangberita.id/berita/detail/fraksi-pdi-perjuangan-sebut-edy-rahmayadi-berpeluang-dua-periode-bila-sukses-dengan-proyek-infrastruktur-27-t>

<https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/11/09/2019/setahun-eramas-versi-fraksi-pdip-dprdsu-minta-gubsu-perbaiki-komunikasi-politik>